

KEBIJAKAN SEKOLAH INTERNASIONAL

Oleh : Asep Sumaryana¹

Abstract

International school orientation to quality without forgotten of local values. There for must be available choice for region government for increasing quality of all elementary and medium school. Important for attented when using english more often then Indonesian. If that do it, perhaps persepction english more important than bahasa Indonesia.

Kata Kunci : Kebijakan, Sekolah Internasional.

A. Pendahuluan

Judul dimaksud bertumpu pada “taraf” atau “level”, bukan pada yang diselenggarakan oleh pihak asing sehingga dinamai juga dengan sekolah bertaraf Internasional (SBI). Dalam sebuah diskusi bulan Agustus 2007 di Jakarta terungkap bahwa sekolah tersebut tidak bertumpu pada penggunaan bahasa asing saja namun juga pada pola pikir dan metode pengajarannya. Artinya, penggunaan bahasa asing tidak dapat berbuat banyak ketika metode dan pola pikirnya masih tradisional sehingga mungkin akan lebih baik ketika bahasa lokal dengan metode internasional yang teruji.

Dalam pedoman penjaminan mutu sekolah/madrasah SBI yang dikeluarkan Depdiknas 2007, terungkap bahwa sebuah sekolah internasional harus memiliki akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional ditambah mendapat akreditasi sekolah pada salah satu negara anggota OECD (organization for Economic Cooperation and Development) atau negara maju lainnya yang memiliki keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan. Sementara itu dari sisi kurikulum selain menggunakan SKS juga berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memungkinkan setiap siswa dapat mengakses transkripnya masing-masing.

B. Ciri dan Syarat

Dari pedoman diatas tampak bahwa menjamurnya SBI perlu dipandang sebagai fenomena yang pelaksanaannya diapresiasi oleh semua pihak. Ketika banyak daerah berusaha membangun SBI bisa jadi potensi dan kebutuhan daerah tersebut sudah demikian tinggi. Hal demikian sejalan dengan kecenderungan bahwa SBI dijadikan sebagai indikator kemajuan pendidikan di suatu daerah. Dengan demikian, SBI merembet pada ukuran ekonomis lainnya seperti kemampuan ekonomi orangtua siswa sudah baik serta komitmen penduduk pada kualitas pendidikan cukup tinggi.

Sugito (2007) menyampaikan beberapa ciri SBI, yaitu :

1. pengajarannya yang bervariasi dengan mengutamakan standar pendidikan berkualitas tinggi-metode student centered;
2. sarana sekolah yang nyaman dan modern;
3. kelas dengan jumlah murid sedikit;
4. ijazah yang diakui internasional;
5. mempersiapkan murid memasuki perguruan tinggi;
6. bahasa pengantar asing.

Selanjutnya disampaikan pula bahwa SBI mempersyaratkan hal-hal berikut:

¹⁾ Asep Sumaryana adalah Lektor Kepala pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unpad dan Sekretaris LP3AN Unpad

1. Peningkatan mutu sekolah harus setara dengan sekolah internasional dan memperoleh akreditasi dari lembaga internasional;
 2. guru dan kepala sekolah harus memperoleh sertifikasi dan atau lisensi internasional;
 3. peningkatan mutu sekolah harus dilandasi suatu rencana yang menggunakan pendekatan bottom up?
 4. partisipasi masyarakat, penda propinsi dan kota selama proses peningkatan mutu sampai dengan pencapaian standar internasional untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program sekolah tersebut;
 5. melibatkan instansi profesional, LPMP untuk menjamin keberlanjutan program sekolah yang bertaraf internasional;
 6. bermitra dengan sekolah luar negeri sehingga lulusannya dapat diterima di perguruan tinggi luar maupun dalam negeri.
- (Sugito, 2007)

Ada penjelasan Sugito yang diragukannya sendiri yakni persoalan "bottom up". Persoalan ini tentu saja bertumpu pada kebutuhan lokal. Bisa saja satu daerah dengan daerah lain akan memandang berbeda persoalan SBI tersebut. Oleh sebab itu SBI menjadi pemikiran tiga instansi terkait, yakni Depdiknas cq Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (MPDM); pemerintah Propinsi dan juga pemerintah Kabupaten/Kota. Ketiganya harus bahu membahu mengatur baik izin maupun teknis operasional agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari.

C. Kewenangan Pemerintah dan Sekolah

Ketiga pihak pemerintah diatas memiliki kewenangan yang berbeda satu dengan yang

lainnya. MPDM memiliki kewenangan sebagai berikut²:

- a. merumuskan dan melaksanakan pengaturan dan perizinan secara nasional atas penyelenggaraan Sekolah/Madrasah bertaraf Internasional;
- b. melakukan pembinaan teknis manajerial atas penyelenggaraan sekolah/ madrasah bertaraf Internasional;
- c. mendukung upaya setiap sekolah/ madrasah bertaraf Internasional untuk mengembangkan dan/atau memperkaya sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pendidikan;
- d. melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sekolah/madrasah bertaraf Internasional;
- e. memberikan fasilitasi teknis terselenggaranya Ujian Nasional bagi Sekolah/ Madrasah bertaraf Internasional;
- f. membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penjaminan mutu infra-struktur Sekolah/Madrasah bertaraf Internasional;
- g. melakukan pengawasan manajerial atas penyelenggaraan sekolah/ madrasah bertaraf Internasional.

Sementara itu kewenangan pemerintah propinsi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Propinsi adalah³:

1. menyusun kebijakan operasional Sekolah/ Madrasah bertaraf Internasional di tingkat propinsi sesuai dengan kebijakan nasional;
2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program sekolah/madrasah bertaraf Internasional antar kabupaten/kota;
3. memberikan dukungan informasi dan layanan mengenai pengaturan dan perizinan pendirian bagi penyelenggaraan sekolah/madrasah bertaraf Internasional;

²⁾ dapat dilihat pada Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas, 2007 halaman : 21-24

³⁾ opcit

4. memberikan fasilitasi terselenggaranya ujian nasional bagi sekolah/madrasah bertaraf Internasional;
5. melakukan pengawasan dalam rangka penjaminan mutu sekolah/madrasah bertaraf Internasional;
6. menyediakan layanan sistem informasi dan data sekolah/madrasah bertaraf Internasional di tingkat propinsi.

Dalam konteks yang sama pemerintah kabupaten/kota yang diwakili Dinas Pendidikan Kabupaten/kota memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. menyusun kebijakan operasional sekolah/madrasah bertaraf Internasional di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program antar sekolah/madrasah bertaraf Internasional;
3. memberikan dukungan informasi dan layanan mengenai pengaturan dan perizinan pendirian bagi penyelenggaraan sekolah/madrasah bertaraf Internasional;
4. memberikan fasilitasi terselenggaranya ujian nasional bagi sekolah/madrasah bertaraf Internasional;
5. melakukan pengawasan dalam rangka penjaminan mutu sekolah/madrasah bertaraf Internasional;
6. menyediakan layanan sistem informasi dan data sekolah/madrasah bertaraf Internasional di tingkat kabupaten/kota.

Untuk mendukung dan merealisasikan kewenangan pemerintah tersebut, maka SBI menetapkan hal-hal yang berlaku pada tingkat sekolah/madrasah sebagai berikut :

1. menyusun program sekolah/madrasah bertaraf Internasional, baik jangka pendek dan menengah maupun jangka panjang;
2. mengembangkan dan /atau memperkaya standar nasional pendidikan dengan cara adaptasi atau adopsi yang mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju

lainnya yang mempunyai kelebihan tertentu dalam bidang pendidikan;

3. mengadaptasi dan/atau mengadopsi model-model pengembangan dan/atau pengayaan standar nasional pendidikan yang disusun oleh Dirjen MPDM mengenai standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan; Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan Badan Penelitian dan Pengembangan mengenai standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian;
4. melaksanakan ujian nasional yang diselenggarakan oleh BSNP;
5. memelihara dan meningkatkan mutu sekolah/madrasah untuk berdaya saing di tingkat nasional dan internasional;
6. menyediakan layanan sistem informasi dan data di tingkat sekolah/madrasah.

Dari uraian tersebut diatas tampaknya urutan kewenangan yang harus ditempuh memerlukan adaptasi dan adopsi yang berkelanjutan. Kewenangan dari level yang lebih bawah tentu merujuk kepada yang lebih atasnya sehingga pelaksanaan kebijakan tentang SBI tidak akan bertabrakan satu dengan yang lainnya.

D. Pro-Kontra

Visi SBI: terwujudnya insan Indonesia yang cerdas, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, berahlaq mulia, berjati diri Indonesia, dan kompetitif secara global. Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi : mewujudkan insan Indonesia yang mampu bersaing dan berkolaborasi secara global; sehingga tujuannya menjadi : menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi berkelas nasional dan internasional sekaligus.

Tampaknya mewujudkan ketiga hal sekaligus menjadi kesulitan yang tidak dapat diakomodasi oleh setiap daerah kabupaten/kota. Namun demikian, ada kecenderungan bahwa setiap daerah berkeinginan

membangun SBI tanpa mempertimbangkan kondisi serta situasi yang ada di daerahnya. Dikatakan demikian, dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, persoalan pendidikan yang berkaitan dengan sarana/prasarana terbatas masih meliputi banyak daerah yang ada di Indonesia; kedua, masih dominannya masyarakat daerah yang masih kesulitan mendanai pendidikan anaknya.

Dalam banyak kasus, bukan hal yang luar biasa tatkala ada sekolah yang mau roboh, sementara di pihak lain ada sekolah yang mampu membangun masjid sekolah yang cukup bagus. Persoalan ini menunjukkan tidak seragamnya sarana/prasarana sekolah yang dipicu dengan persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit dengan tidak favorit. Kesenjangan semacam ini perlu mendapat penanganan terlebih dahulu sebelum melangkah ke SBI. Artinya, pemda perlu meminimalisasikan kesenjangan kedua kelompok sekolah agar kesempatan sekolah bagi anak sama di setiap sekolah yang ada di wilayahnya.

Kemiskinan dapat dilihat dari pengguliran dana biaya operasional sekolah (BOS). Rebutan BOS menunjukkan bahwa kesulitan mendanai sekolah masih menyelimuti banyak orangtua dari berbagai jenjang. Kesmiskinan ini mendorong pemikiran untuk pemda agar dapat menciptakan sekolah yang gratis bagi semua anak dalam koridor wajib belajar (wajib). Dalam konteks ini, biaya sekolah dibebaskan dalam jenjang *wajar*. Dengan cara seperti itu kesenjangan pendidikan penduduk dapat diminimalisasikan agar pemda memiliki sumber daya manusia yang cukup baik.

Pendidikan penduduk tampaknya perlu memperoleh status baru dalam konteks pemerintah. Pendidikan sebagai beban perlu diubahnya menjadi peluang. Pengeluaran anggaran pendidikan bagi pemerintah sebenarnya bukan beban dalam jangka panjang, namun peluang. Dengan membaiknya pendidikan masyarakat, maka peluang memperbaiki ekonomi masyarakat akan

semakin baik. Oleh sebab itu orientasi pendidikan lebih cocok untuk diarahkan bagi pengembangan potensi lokal sehingga jenis pendidikan di masing-masing daerah akan berbeda. Di daerah perkotaan bisa jadi SMK otomotif yang berkembang, di pedesaan mungkin SMK pertanian, dan di pantai akan kelautan, demikian halnya di pedalaman akan berkembang SMK kehutanan.

Konteks kompetitif secara global, tampaknya perlu ditafsirkan bahwa masyarakat terdidik Indonesia tidak tergantung dengan negara lain. Jepang sendiri mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi negara kuat. Ketergantungan terhadap negara asing menyebabkan Indonesia tidak dapat bersaing dan selalu berada dibawah negara yang digantunginya. Ketika muncul SBI pun tampaknya negara OECD yang terdiri dari negara-negara maju masih menjadi rujukan dari sisi yang *masif*, yakni penggunaan bahasa inggrisnya.

Indikator penggunaan bahasa Inggris sebagai SBI tampaknya menguat. Banyak sekolah dengan kelas unggulan menggunakan bahasa tersebut sebagai pengantar dalam beberapa bidang studi. Dalam banyak pengamatan seringkali hal tersebut mendorong guru untuk mengadakan les agar yang disampaikan dengan bahasa asing tersebut diulang dengan bahasa nasional. Artinya tidak banyak guru *pede* mengajar dalam bahasa asing tersebut, apalagi anak didiknya. Ketika semakin banyak sekolah mengidentikkan penggunaan bahasa Inggris dengan kemajuan sekolahnya, maka akan semakin tertinggalkan juga bahasa yang dalam sumpah pemuda sangat dibanggakan : berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia.

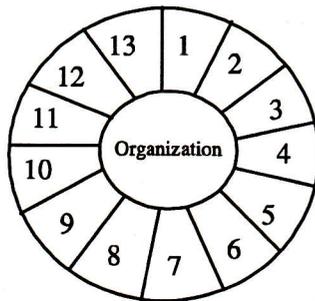
Dari sisi kultur, *bengkung ngariung bongkok ngaronyok* atau *mangan ora mangan waton ngumpul* adalah budaya yang menghendaki kedekatan sesama anggota keluarga. Nilai tersebut dijadikan kebutuhan sehingga nilai sejajar dengan kebutuhan untuk dipertahankan⁴. Dalam konteks ini bekerja di

⁴ lihat Dananjaya, 1986. Sistem Nilai Manajer Indonesia.

luar negeri bukan menjadi tujuan banyak orang yang ada di tanah air. Tentu saja hal semacam ini tidak dapat dipersepsikan sebagai lemahnya daya saing bangsa. Pandangan bahwa kekayaan alam yang melimpah dapat dijadikan alasan untuk tetap bertahan *kumpul*. Dampak susulannya tidak banyak orangtua rela anaknya bekerja jauh dari dirinya.

Nilai semacam diatas tampaknya perlu dipikirkan oleh pemda untuk membangun SBI. Kehadiran SBI perlu didasarkan pada kebutuhan lokal, bukan status sosial pemda dimata pemda lainnya. Ketika status sosial mengedepan, maka akan terjadilah *cul dog-dog tinggal igel*. Kebutuhan akan diabaikan untuk mengejar status tersebut sehingga pengeluaran anggaran akan tidak sebanding dengan benefit bagi masyarakat dan pembangunan daerahnya. Namun bagi pemda yang telah mampu pemeratakan kualitas sekolah dan ketersediaan anggaran untuk hal tersebut, bisa saja SBI menjadi kebutuhan untuk direalisasikan.

Jika Griffin (1996:112-114) menjadi rujukan dalam konteks tersebut diatas, maka ada 13 aspek lingkungan yang berinteraksi dengan sebuah organisasi. Pemda lainnya merupakan salah satu dari ketiga belas yang mengitari untuk diperhatikan. Lebih jelasnya Griffin membuatnya dalam sebuah gambar sebagai berikut:



Masyarakat lokal tampaknya tidak dapat diabaikan secara kualitas, kuantitas juga kebutuhan dan aspirasinya. Dengan konsep pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat setempat perlu menjadi prioritas disamping lingkungan lainnya. Dengan perhatian kepada masyarakat tersebut, maka kehadiran SBI yang dibutuhkan masyarakat akan mendapat dukungan guna mempercepat proses pengembangan masyarakat itu sendiri.

Pada saatnya pedoman Penjaminan Mutu SBI tidak ditafsirkan sebagai keharusan. Dalam konteks otonomi daerah, kewenangan daerah untuk membangun daerah sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang ada merupakan pilihan yang harus dipertahankan⁵. Namun ketika pilihan tersebut dilakukan, maka aturan pusat yang memayunginya tidak boleh diabaikan⁶. Dengan demikian, ketika pemda masih bertumpu pada upaya penuntasan program *wajar*, maka lakukan dengan tuntas kewajiban pemerintah tersebut jangan *kagembang* oleh aroma pretisius yang membius.

E. Penutup

SBI memang perlu dikembangkan sejalan dengan kebutuhan kedepan. Namun hal itu tidak

1. Creditor
2. Customers
3. Local Community
4. Supplier
5. Employees
6. Interest groups
7. Trade Associations
8. Owners/Investor
9. Courts
10. Colleges and Universities
11. Foreign Government
12. State/Federal Government
13. Local Government

Gambar 8 : Lingkungan Organisasi

sumber : Ricky W. Griffin. Management, 5 Th Edition, Houghton Mifflin Company, 1996 , halaman 113.

⁵⁾ cocokkan dengan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁶⁾ Gladden dalam Bintoro Tjokromaidjojo, 1987

berarti bahwa pemerintah *cul dog-dog tinggal igel* yang menyebabkan *fardu kalarung sunat kalampah*. Keseimbangan perlu untuk mendapat perhatian agar pro-kontra dapat dimusyawarahkan bersama. Faktor kearifan lokal bukan sesuatu yang dapat digantikan oleh muatan internasional yang belum tentu dibutuhkan pada masa sekarang. Yang mungkin sedang terjadi adalah kearifan tersebut cenderung terlupakan sejalan dengan orientasi masyarakat, khususnya terdidik ke dunia barat yang dianggapnya maju dan modern. Untuk itu apa yang bisa diperoleh Barat cenderung ingin dikejanya pula. Bila hal demikian terus terjadi, bisa-bisa bangsa kita dianggap tidak pernah bisa mandiri, termasuk dibidang pendidikan.

Sebagai gambaran, hasil penelitian dari National Association of College and Employee (NACE) 2002 menempatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di Perguruan Tinggi (PT) pada urutan ke-17. IPK kalah oleh kemampuan komputer, kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, kepercayaan diri, ramah, sopan, dan bijaksana. Namun kemampuan komunikasi, bekerjasama, interpersonal, etika, inisiatif, adaptasi, dan analitik lebih penting daripada komputer. Bisa jadi ada keraguan bahwa IPK tinggi adalah bagus, demikian sebaliknya⁷.

Bisa jadi di level sekolah dasar dan menengah juga perlu memperhatikan apa yang berkembang di dunia Barat agar tidak *tuturut munding* dengan *kacamata kuda*. Masih ada waktu dan belum terlambat. Semoga pendidikan Indonesia berkembang pesat dan berakar pada kultur luhur bangsa dengan kulaitas Internasional. Semoga !!!

E. Daftar Pustaka

- Dananjaya. 1986. *Sistem Nilai Manajer Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Presindo.
- Griffin. R.W. 1996. *Management*. Houghton Mifflin Company.
- Haryana. 2007. *Sekolah Bertaraf Internasional*. Makalah Diskusi. Depdiknas Jakarta.
- Sugito. AT. 2007. *Sekolah Internasional*. Makalah Diskusi Depdiknas Jakarta.
- Sumaryana. Asep. *IPK VS Soft Skills*. Pikiran Rakyat, 18 Juli 2007.
- Tjokromamidjojo. 1990. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional. 2007. Depdiknas: Jakarta.

⁷⁾ Asep Sumaryana. *IPK VS Soft Skills*. Bandung : Pikiran Rakyat 18 Juli 2007.